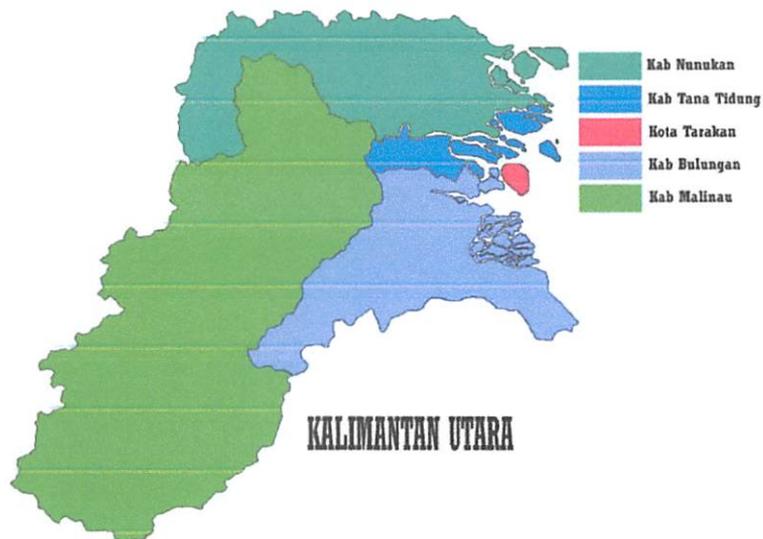




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Jl. Bhayangkara Gang III Telp. 0552-2026608, Faks. 0552-2026052
TANJUNG SELOR - KALIMANTAN UTARA



RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Provinsi Kalimantan Utara telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018.

Laporan ini berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang memberi arah segenap aparatur dalam melaksanakan berbagai aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 telah ditetapkan 6 (enam) sasaran yang akan direalisasikan pada Tahun 2018 melalui 6 (enam) program yang diimplementasikan dalam 32 (tiga puluh dua) kegiatan, secara keseluruhan disimpulkan bahwa kinerja yang dicapai dari 32 (tiga puluh dua) kegiatan dengan capaian sebesar 99,38 %. capaian kinerja tersebut pada rentang antara 85 – 100 % dengan interpretasi “AA “.

Demikian laporan kinerja instansi pemerintah Tahun 2018 ini dibuat, semoga dapat menjadi gambaran kinerja yang telah dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara ini dapat dijadikan media pengelolaan kinerja ke arah perbaikan menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance).

Tanjung Selor, 08 Januari 2019

Kepala, 

Drs. BASIRAN, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP: 19691228 199101 1 001



DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
A. Tugas Pokok	1
B. Fungsi/Kedudukan	1
C. Struktur Organisasi.....	2
D. Susunan Organisasi.....	3
E. Sumber Daya Manusia Aparatur	3
F. Sarana dan Prasarana	4
G. Sumber Dana	7
H. Isu Strategis/Permasalahan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Visi dan Misi	9
2.2. Tujuan Strategis	13
2.3. Sasaran Organisasi.....	14
2.4. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran	16
2.5. Perjanjian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	22
3.2. Analisa Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018.....	27
3.3. Realisasi Anggaran	28
BAB IV PENUTUP	30

LAMPIRAN:

1. Tabel Rencana Kerja Tahun 2018 (Form RKT)
2. Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2018 (Form PK)
3. Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2018 (Form PKK)



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dasar pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur Kalimantan Utara dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Tugas Pokok

Menurut pasal 17 Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014 Tugas pokok dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

B. Fungsi/Kedudukan

Dalam pasal 18 Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 10 Tahun 2014 bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik untuk penyelenggaraan tugas pokoknya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

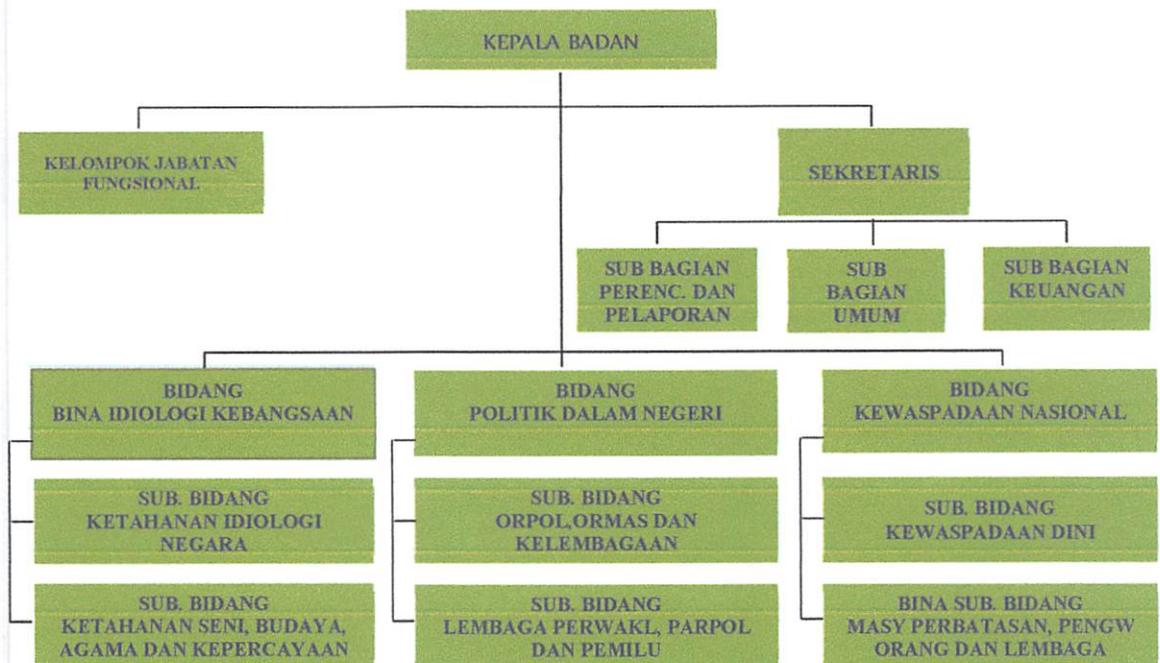


- 2) Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 3) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pembinaan Ideologi Kebangsaan.
- 4) Perumusan, peencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Politik dalam Negeri.
- 5) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Kewaspadaan Nasional
- 6) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- 7) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang dibeikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Struktur Organisasi

Tabel 1.1

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESBANGPOL PROV. KALIMANTAN UTARA
(Pergub Nomor : 10 Tahun 2014)





D. Susunan Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara ditunjang dengan rincian Susunan Organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 10 Tahun 2014 tanggal 10 Maret 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara, dengan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari:

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretaris
 - a) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - b) Kepala Sub Bagian Umum
 - c) Kepala Sub Bagian Keuangan
- 3) Kepala Bidang Pembinaan Idiologi Kebangsaan
 - a) Sub Bidang Ketahanan Idiologi Negara
 - b) Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kepercayaan
- 4) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
 - a) Sub. Bidang Orpol, Ormas dan Kelembagaan
 - b) Sub. Bidang Lembaga perwakilan, Parpol dan Pemilu
- 5) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional
 - a) Sub. Bidang Kewaspadaan Dini
 - b) Sub. Bidang Bina Masyarakat Perbatasan, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing

E. Sumber Daya Manusia Aparatur

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2018 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak **32 (tiga puluh dua)** orang yang terdiri dari pendidikan Paska Sarjana (S2) sebanyak **5 (lima)** orang, Sarjana (S1) sebanyak **18 (Delapan belas)** orang, D.3 sebanyak **3 (tiga)**



Orang dan SLTA sebanyak **6 (enam)** orang, jumlah tersebut sangat belum mencukupi kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja yang ada.

Tabel 1.2

Kondisi Sumber Daya Aparatur Tahun 2018
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalimantan Utara
Menurut Kualifikasi Pendidikan

NO	KONDISI SEKARANG			KONDISI YANG DIHARAPKAN			
	PENDIDIKAN	JENIS KEPEG.	JUMLAH	PENDIDIKAN	JENIS KEPEG.	JUMLAH	
1.	SLTA	PNS	6	SLTA	PNS	8	
2.	D III	PNS	3	D III	PNS	11	
3.	S1	PNS	18	S1	PNS	23	
4.	S2	PNS	5	S2	PNS	5	
JUMLAH			32	JUMLAH			47

Sumber : Badan Kesbangpol Tahun 2018

F. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa Sewa kantor yang terletak di Jalan Bhayangkara Rt. 93 Rw.35 Nomor Tanjung Selor, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.3

Daftar Sarana Dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018

NO	NAMA BARANG	SATUAN/ UNIT	PEROLEHAN/TAHUN
1	2	3	4
1.	Toyota Inova	1	Dari Biro Umum dan Perlengkapan 2013
2.	Toyota Hilux Type G	1	Dari Biro Umum dan Perlengkapan 2013
3.	Toyota Avanza Type G	1	Dari Biro Umum dan Perlengkapan 2013
4.	Honda Blade	3	Dari Biro Umum dan Perlengkapan 2013



5.	Komputer PC Acer	8	Pengadaan	2013
6.	Laptop Sony Vaio	6	Pengadaan	2013
7.	Komputer all in one	2	Dari Biro Umum dan Perlengkapan	2013
8.	Laptop HP	2	Dari Biro Umum dan Perlengkapan	2013
9.	Printer Canon MP 237	5	Pengadaan	2013
10.	Printer LQ 2190	1	Pengadaan	2013
11.	Meja pimpinan	1	Pengadaan	2013
12.	Kursi pimpinan	1	Pengadaan	2013
13.	Meja kerja	30	Pengadaan	2013
14.	Kursi kerja	30	Pengadaan	2013
15.	Sofa Tamu	1	Pengadaan	2013
16.	Meja sekuriti	2	Pengadaan	2013
17.	Lemari Arsip	5	Pengadaan	2013
18.	Toyota Hilux Type V	1	Pengadaan	2014
19.	Toyota Hilux Pick Up	3	Pengadaan	2014
20.	Toyota Rush	4	Pengadaan	2014
21.	Honda Supra X	8	Pengadaan	2014
22.	Honda CBR	4	Pengadaan	2014
23.	Laptop HP	8	Pengadaan	2014
24.	Printer Epson LX 310	3	Pengadaan	2014
25.	Printer Epson L350	6	Pengadaan	2014
26.	Printer Canon LBP 6000	2	Pengadaan	2014
27.	Hardisk 1 TB	4	Pengadaan	2014
28.	Flask disk	7	Pengadaan	2014
29.	Kamera Canon EOS 600D	5	Pengadaan	2014
30.	Handycam Sony	3	Pengadaan	2014
31.	Infokus	5	Pengadaan	2014
32.	Handy Talki	32	Pengadaan	2014
33.	Brangkas	1	Pengadaan	2014
34.	Pemotong Kertas	1	Pengadaan	2014
35.	Felling kabinet	5	Pengadaan	2014



36.	Mesin ketik manual	1	Pengadaan	2014
37.	Laptop	5	Pengadaan	2015
38.	Printer	2	Pengadaan	2015
39.	Printer	10	Pengadaan	2015
40.	Kipas Angin	5	Pengadaan	2015
41.	Exster Hard Disk 2 TB	6	Pengadaan	2015
42.	Flasdis 32 GB Usb 3.0	10	Pengadaan	2015
43.	Mesin Jilid	1	Pengadaan	2015
44.	Mesin Pres	1	Pengadaan	2015
45.	Router	1	Pengadaan	2015
46.	Switch	1	Pengadaan	2015
47.	Kabel Jaringan	1	Pengadaan	2015
48.	Scaner Outomatik	3	Pengadaan	2015
49.	Sepeda Motor Vario	6	Pengadaan	2015
50.	Mobil Toyota Fortuner	1	Pengadaan	2015
51.	AC Mobil dan Tape	3	Pengadaan	2015
52.	Komputer PC	5	Pengadaan	2015
53.	Mesin Foto Copy	1	Pengadaan	2015
54.	Penghisap Debu	1	Pengadaan	2015
55.	Penghitung Uang	1	Pengadaan	2015
56.	Mesin Ginset	1	Pengadaan	2015
57.	Mesin Absensi	1	Pengadaan	2015
58.	Filling Kabinet	5	Pengadaan	2015
59.	UPS	4	Pengadaan	2015
60.	Komputer PC HP	2	Pengadaan	2016
61.	Kursi Hadap	4	Pengadaan	2016
62.	Kursi Tamu	2	Pengadaan	2016
63.	Meja Kerja Kayu/Esl IV	5	Pengadaan	2016
64.	Kursi Kerja Esl IV	7	Pengadaan	2016
65.	Amplifier	1	Pengadaan	2016
66.	Perlengkapan Mic	1	Pengadaan	2016



67.	Speaker	1	Pengadaan	2016
68.	Printer Portable	1	Pengadaan	2016
69.	Mesin Ketik Standar	2	Pengadaan	2016
70.	Lemari Arsip	2	Pengadaan	2016
71.	DVR	1 Unit	Pengadaan	2017
72.	Camera Indoor	10 Unit	Pengadaan	2017
73.	Camera Outdoor	6 Unit	Pengadaan	2017
74.	Cablel CCTV	1 Unit	Pengadaan	2017
75.	Jek BNC	32 Unit	Pengadaan	2017
76.	PSU	1 Unit	Pengadaan	2017
77.	Instalasi dan Asesoris	1 Unit	Pengadaan	2017
78.	Dak Kable 45x40	2 Unit	Pengadaan	2017
79.	TV 32 Inchi	1 Unit	Pengadaan	2017
80.	Komputer PC	1 Unit	Pengadaan	2018
81.	Printer Epson L565	3 Unit	Pengadaan	2018
82.	Lemari Arsip/Filling	3 Unit	Pengadaan	2018

G. Sumber Dana

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar **Rp. 10.143.249.088,-** (*Sepuluh milyar seratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah*) dengan rincian belanja tidak langsung sebesar **Rp. 4.641.742.164,-** (*Empat milyar enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah*) dan belanja langsung sebesar **Rp. 5.501.506.924,-** (*Lima milyar lima ratus satu juta lima ratus enam ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah*).



H. Isu Strategis/Permasalahan

Dalam menyusun rencana strategis untuk kurun 5 tahun mendatang telah ditetapkan 3 (tiga) isu yang menjadi perhatian Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Kalimantan Utara, adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemahaman terhadap rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan.
2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik.
3. Isu sara sering menjadi pemicu konflik sosial.

Permasalahan yang saat ini berkembang sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara adalah:

1. Menurunnya rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan dikalangan masyarakat..
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik.
3. Isu sara sering menjadi pemicu konflik sosial.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan tugas dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara mempunyai Rencana Strategik yang berorientasi pada hasil (Outcome) yang dicapai selama kurun waktu 5 (Lima) tahun, yaitu untuk Tahun 2017 – 2021 dengan perhitungan kekuatan, peluang, kelemahan dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara yang menyangkut visi, misi, tujuan dan sasaran serta bagaimana cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diuraikan dalam bab ini, Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2018 akan dijelaskan dalam Perjanjian Kinerja (*Performance Plan*) 2018.

2.1. VISI DAN MISI

a. Visi

Visi ***“Berpadu dalam kemajemukan untuk mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman dan Damai, dengan didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”***.

Diformulasikan berdasarkan hasil analisis terhadap potensi daerah dan permasalahan mendasar serta isu strategis yang terjadi di Kalimantan Utara.

Provinsi Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan terdepan merupakan upaya optimal yang dilakukan oleh seluruh pelaku pembangunan untuk mewujudkan provinsi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat terbaik yang berada di wilayah perbatasan. Sebagai wilayah perbatasan terdepan Provinsi Kalimantan Utara merupakan pintu gerbang, penjaga keutuhan, kemerdekaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melambangkan kemakmuran bangsa Indonesia. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang ingin dicapai kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan dan pintu gerbang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, berdaulat, sejahtera dan berkelanjutan. Sebagai wilayah perbatasan terdepan melambangkan



tingkat kemajuan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara, khususnya. Pendekatan keamanan, kesejahteraan dan lingkungan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan.

Sebagai wujud dari wilayah perbatasan terdepan ditandai dengan tingginya aksesibilitas wilayah yang mendukung konektivitas antar wilayah, khususnya dengan pusat pemerintahan, pusat pelayanan publik dan wilayah lain yang relatif lebih maju; serta terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana wilayah melalui pembangunan infrastruktur sebagai pendukung terciptanya keseimbangan dengan wilayah perbatasan negara tetangga. Pengembangan perbatasan yang maju akan mengurangi beban pemerintah pusat karena warga yang sejahtera di perbatasan akan membantu menjaga kehormatan NKRI, termasuk dalam penyelesaian kejelasan tapal batas dengan negara tetangga. Hal ini akan mendukung kehormatan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara yang menjaga wilayah perbatasan dengan menunjukkan kondisi yang melambangkan kondisi Indonesia seluruhnya yang baik dan sejahtera.

Dalam perencanaan pembangunan Kalimantan Utara realitasnya masih memiliki beberapa permasalahan-permasalahan mendasar yang harus segera diselesaikan. Permasalahan itu adalah kondisi geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing.

b. Misi

Pembangunan Kalimantan Utara 2016-2021 mengemban visi yang harus direalisasikan adalah "***Berpadu dalam kemajemukan untuk mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman dan Damai, dengan didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa***" yang diwujudkan melalui sinergi tiga pokok visi yaitu : (1) Visi Mandiri, (2) Visi Aman dan Damai, (3) Visi Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.



Sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara, maka analisis terhadap misi Kepala Daerah Terpilih diarahkan pada misi ke 2 (Dua): Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai dan misi ke 3 (Tiga): Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa, telaahan terhadap misi 2 dan 3 adalah sebagai berikut :

1) Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai

Misi yang kedua, mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang aman dan damai, secara umum mengandung arti terciptanya kondisi yang menenteramkan masyarakat dalam menjalankan kehidupan mereka sehari-hari tanpa terganggunya kondisi keamanan dan kedamaian di seluruh wilayah provinsi.

Secara khusus, disamping berbagai upaya lainnya, misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting terkait keamanan dan kedamaian wilayah yang selama lima tahun mendatang harus tercapai dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang aman dan damai antara lain: menjaga kedaulatan negara, dan mewujudkan penegakan hukum. Pertahanan dan keamanan memang merupakan tugas dari pemerintah pusat, namun tanpa mengesampingkan ketentuan formal yang ada keamanan wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah perbatasan perlu diciptakan karena dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat setempat. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu mendukung penciptaan suasana aman dan damai ini sesuai dengan peran seperti yang diatur dalam ketentuan yang ada.

Bagian dari misi untuk menjaga kedaulatan negara diarahkan untuk daerah perbatasan dan wilayah secara keseluruhan.

Di perbatasan diupayakan untuk mendukung kemudahan terjaganya keutuhan NKRI sedangkan di wilayah keseluruhan diarahkan untuk menjaga keamanan secara umum. Sedangkan bagian dari misi untuk membangun perbatasan yang aman



diarahkan untuk mewujudkan daerah perbatasan yang tertib dan tenteram.

Bagian dari misi untuk mewujudkan penegakan hukum diarahkan pada upaya untuk mewujudkan penegakan hukum dengan cara menyiapkan berbagai ketentuan untuk menjadi dasar penegakan hukum dan melakukan berbagai implementasi ketentuan tersebut di kegiatan nyata di lapangan. Adapun faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi badan kesbangpol terkait dengan misi kedua adalah:

- a) Faktor pendorong adalah peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat, agama, adat dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif.
 - b) Faktor penghambat:
 1. Masih rendahnya pemahaman hukum dikalangan masyarakat.
 2. Masih rendahnya keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan.
- 2) Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa

Misi yang ketiga yaitu mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang bersih dan berwibawa, secara umum mengandung arti mengupayakan terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai kondisi yang harus terwujud untuk landasan mewujudkan visi lima tahun ke depan. Secara khusus misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting terkait praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dalam arti bersih dan berwibawa selama lima tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa antara lain: mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel; mewujudkan pelayanan publik yang prima.



Bagian dari misi untuk mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel diarahkan pada upaya mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas serta mewujudkan pemerintahan akuntabel.

Bagian dari misi untuk mengupayakan terwujudnya pelayanan publik yang prima diarahkan pada penguatan suasana pemerintahan yang menjadi abdi masyarakat dalam pelayanan publik, upaya terwujudnya pelayanan perizinan yang selalu meningkatkan pelayanan kependudukan. Adapun faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi badan kesbangpol terkait dengan misi ketiga adalah:

- a) Faktor pendorong adanya kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas aparatur.
- b) Faktor penghambat adalah strategi, kebijakan dan peraturan perundang-undangan sering mengalami perubahan sehingga menjadi permasalahan dalam pelaksanaan dilapangan.

2.2. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia, yang ingin menjadikan suatu realita antara keinginan (das solen) dan kenyataan (das sein), pada kurun waktu tertentu.

Tujuan yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara untuk Tahun 2018 – 2021 sebanyak 6 (Enam) tujuan adalah sebagai berikut :



Tabel 2.1

NO	MISI	NO	TUJUAN
1	Mewujudkan Kalimantan Utara yang Aman dan Damai	1	Terciptanya ketentraman dan ketertiban dimasyarakat
		2	Menciptakan rasa toleransi antar suku, umat beragama, ras dan golongan
		3	Terlaksananya kegiatan pendidikan politik dimasyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara
2	Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa	4	Terlaksananya transparansi pelayanan adm perkantoran dalam lingkup badan kesatuan bangsa dan politik
		5	Tersedianya sarana dan prasarana kantor dalam mendukung tugas kedinasan
		6	Terwujudnya aparaturnya yang taat peraturan perundang-undangan

2.3. SASARAN ORGANISASI

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Karakteristik dari indikator paling tidak terdiri atas: SMART (Specific, Measurable, Acceptable, Result, Timeliness). Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategik yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun



kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara diutamakan pada upaya tercapainya perwujudan profesionalisme aparatur, yang mampu mendukung perwujudan mutu pelayanan, dan efisien dalam memfasilitasi dan membina terwujudnya daya tahan dan kemandirian daerah dan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan fokus sasaran tersebut secara lebih operasional, maka Badan Kesatuan dan Bangsa Provinsi Kalimantan Utara menetapkan sasaran dalam periode Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2

No.	TUJUAN		SASARAN
1	Terciptanya ketentraman dan ketertiban dimasyarakat	1	Terwujudnya rasa tentram dan aman serta nyaman dilingkungan masyarakat
2	Menciptakan rasa toleransi antar suku, umat beragama, ras dan golongan	2	Terwujudnya rasa toleransi antar suku, umat beragama, ras dan golongan
3	Terlaksananya kegiatan pendidikan politik dimasyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara	3	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berpolitik yang sehat dan demokratis
4	Terlaksananya transparansi pelayanan adm perkantoran dalam lingkup badan kesatuan bangsa dan politik	4	Terwujudnya transparansi pelayanan adm perkantoran dalam lingkup badan kesatuan bangsa dan politik
5	Tersedianya sarana dan prasarana kantor dalam mendukung tugas kedinasan	5	Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas kedinasan
6	Terwujudnya aparatur yang taat peraturan perundang-undangan	6	Meningkatnya kesadaran aparatur terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator dari masing – masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Sasaran		Indikator	
1		2	
1.	Terwujudnya rasa tenang dan aman serta nyaman dilingkungan masyarakat	1.	Persentase kelompok masyarakat dan tokoh masyarakat yang berpartisipasi dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan
2.	Terwujudnya rasa toleransi antar suku, umat beragama, ras dan golongan	2.	Persentase masyarakat kaltara yang berwawasan kebangsaan
3.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berpolitik yang sehat dan demokratis	3.	Persentase partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik
4.	Terwujudnya transparansi pelayanan adm perkantoran dalam lingkup badan kesatuan bangsa dan politik	4.	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran
5.	Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas kedinasan	5.	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana apartur
6.	Meningkatnya kesadaran aparatur terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan	6.	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

2.4. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Proses perencanaan strategik merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran.



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara menetapkan kebijakan program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Kebijakan

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara. Tahun 2018 menetapkan 1 (Satu) kebijakan dengan uraian, sebagai berikut:

Tabel 2.4

KEBIJAKAN	
1.	Penyuluhan/sosialisasi tentang rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan.
2.	Mengoptimalkan perananan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) didaerah.
3.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik yang sehat dan demokratis.

b. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan, ditetapkan program kegiatan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 menetapkan 6 (Enam) program utama dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 2.5

Sasaran 1		Program 2	
1.	Terwujudnya rasa toleransi antar suku, umat beragama, ras dan golongan	1.	Pengembangan wawasan kebangsaan
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berpolitik yang sehat dan demokratis	2.	Pendidikan politik masyarakat
3.	Terwujudnya rasa tentram dan aman serta nyaman dilingkungan masyarakat	3.	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
4.	Terwujudnya transparansi pelayanan administrasi dalam lingkup badan kesatuan bangsa dan politik	4.	Pelayanan administrasi perkantoran
5.	Meningkatnya kesadaran aparatur terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan	5.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
6.	Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas kedinasan	6.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

c. Kegiatan

Untuk merealisasikan program kerja operasional maka implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktifitas yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Kegiatan – kegiatan yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2017 sebanyak 28 (Dua puluh) butir meliputi:

Tabel 2.6

KEGIATA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2018

KEGIATAN	
1	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan
6	Penyediaan alat tulis kantor
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8	Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor



9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
10	Penyediaan peralatan rumah tangga
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12	Penyediaan makanan dan minuman
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
14	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan didaerah
15	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
17	Pendidikan dan pelatihan formal
18	Sosialisasi peraturan perundang-undangan
19	Penyuluhan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
20	Pengendalian konflik sosial di masyarakat
21	Peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah dan masyarakat
22	Peningkatan kerjasama pengawasan orang asing dan lembaga asing
23	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
24	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat
25	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
26	Pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam peningkatan wawasan kebangsaan
27	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
28	Penyuluhan politik kepada masyarakat
29	Peningkatan kapasitas partai politik
30	Peningkatan kemitraan pemerintah, orpol, ormas, dan kelembagaan lainnya
31	Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kalimantan Utara
32	Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu, Pilpres, dan Pilkada

2.5. PERJANJIAN KINERJA

Pada dasarnya Perjanjian Kinerja (Performance Plan) 2018 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2018. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2018 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran strategik akan dijadikan benchmark dalam mengukur



keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian misi dan visinya. Target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Ikhtisar target kinerja untuk masing – masing sasaran strategik yang hendak dicapai dalam tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1	Meningkatnya rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan	1	Persentase angka potensi konflik sosial yang berbau suku, agama, ras dan antar golongan	14%
2	Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam kehidupan bebangsa dan bernegara melalui politi	2	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, dan pemilihan kepala daerah	76%

Indikator Kinerja yang merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, Indikator Kinerja Kegiatan terdiri dari:

- a. Masukan (**Inputs**) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Output, misalnya sumber daya manusia, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b. Keluaran (**Outputs**) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan ;
- c. Hasil (**Outcome**) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. **Outcomes** merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat ;
- d. Manfaat (**Benefit**) adalah kegunaan suatu keluaran (**outputs**) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik ;



- e. Dampak (*Impact*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator – indikator tersebut secara langsung dan tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Oleh karena itu untuk kegiatan tahun 2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara baru menerapkan indikator kinerja kegiatan berupa input, Output, dan Outcome sedangkan Benefit dan Impact belum diterapkan dikarenakan belum adanya sistem pengumpulan data untuk indikator kinerja yang dapat diukur secara obyektif. Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2018 secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara adalah perwujudan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Capaian kinerja merupakan inti dari akuntabilitas kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan (proyek) sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara. Pengukuran tersebut merupakan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran berupa, *Input, Output dan Outcome*. Adapun pengukuran tersebut dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja baik dari internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara berasal dari sistem informasi yang ada maupun dari Eksternal Pemerintah.

Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada **Fomulir PKK**.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan Renstra telah menetapkan sasaran strategis untuk Tahun 2018 sebanyak 6 (enam) yang akan direalisasikan dalam 3 (tiga) Kebijakan dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan dengan dijabarkan didalam sasaran strategis yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:



a. Analisa Perbandingan Target dan Capaian Kinerja

Tabel 3.1

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan	1 Persentase angka potensi konflik sosial yang berbau suku, agama, ras dan antar golongan	14%	12,65%	110,71
2	Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam kehidupan kebangsaan dan bernegara melalui politik	2 Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah	76%	65,98%	86,81

- **Sasaran Ke-1** dengan indikator persentase angka potensi konflik sosial yang berbau SARA, dengan capaian indikator sebesar 110,71 %.
- **Sasaran Ke-2** dengan indikator persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, dengan capaian indikator sebesar 86,81 %.

b. Analisa Penganggaran dikaitkan dengan Capaian Sasaran

Tabel 3.2

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 PENGANGGARAN DIKAITKAN DENGAN CAPAIAN SASARAN

No	Sasaran	Indikator	Program	Anggaran (Rp)	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya transparansi pelayanan administrasi perkantoran dalam dalam lingkup badan kesatuan bangsa dan politik	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran	2.251.194.174	100%	2.110.855.610	93,77%
2	Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas kedinasan	Cakupan unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	215.000.000	85%	178.768.596	83,15%



3	Meningkatnya kesadaran terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	378.277.000	70%	322.365.257	85,22%
4	Terwujudnya rasa tenang dan aman serta nyaman di lingkungan masyarakat	Persentase kelompok masyarakat dan tokoh masyarakat yang berpartisipasi dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	871.231.250	88%	792.089.067	90,92%
5	Terwujudnya rasa toleransi antar suku, agama, ras dan antar golongan	Persentase masyarakat Kaltara yang berwawasan kebangsaan	Pengembangan wawasan kebangsaan	858.044.000	80%	789.806.187	92,05%
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berpolitik yang sehat dan demokratis	Persentase masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui politik	Pendidikan politik masyarakat	927.760.000	76%	802.349.221	86,48%
				5.501.506.924		4.996.233.938	92,82%

- **Sasaran Ke-1** mempunyai 14 (empat belas) indikator sasaran, dengan capaian 14 indikator sasaran, dengan capaian 100,00 %.
- **Sasaran Ke-2** mempunyai 2 (dua) indikator sasaran, dengan capaian 2 indikator sasaran, dengan capaian 100,00 %.
- **Sasaran Ke-3** mempunyai 2 (dua) indikator sasaran, dengan 2 (dua) indikator sasaran, dengan nilai capaian 100,00%,
- **Sasaran Ke-4** mempunyai 4 (empat) indikator sasaran, dengan 4 (empat) indikator sasaran, dengan capaian 100,00%.
- **Sasaran Ke-5** mempunyai 5 (lima) indikator sasaran, dengan 5 (lima) indikator sasaran dengan capaian 100,00%.
- **Sasaran Ke-6** mempunyai 5 (lima) indikator sasaran, 3 (tiga) indikator sasaran dengan capaian 100,00% dan 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian 93,39 %, dan 1 (satu) indikator sasaran mencapai 95,10%.



Tabel 3.3

SASARAN		PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN (%)							KET
No	Jumlah Indikator Sasaran kegiatan	>100	100	>90- <99,99	>70- <89,99	>50- <69,99	<50	0	
1.	14	-	14	-	-	-	-	-	-
2.	2	-	2	-	-	-	-	-	-
3.	2	-	2	-	-	-	-	-	-
4.	4	-	4	-	-	-	-	-	-
5.	5	-	5	-	-	-	-	-	-
6.	5	-	3	2	-	-	-	-	-
	Jumlah		30	2	-	-	-	-	-

Dari data tersebut diatas disimpulkan bahwa terdapat 6 (Enam) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 telah dijabarkan sebanyak 32 (Tiga puluh dua) indikator sasaran kegiatan dalam APBD Tahun 2018.

Dengan demikian secara umum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dari 6 (Enam) sasaran strategis yang ditetapkan telah tercapai 99,38 % dengan kategori "AA".

Dengan arti nilai Akuntabilitas Kinerja sebagai berikut :

<i>Kategori</i>	<i>Nilai</i>
AA	85 -100
A	75 - 85
B	65 - 75
CC	50 - 65
C	30 - 50
D	00 – 30



3.2. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2018

Salah satu cara untuk mengevaluasi peningkatan kinerja adalah dengan membandingkan pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya yaitu antara capaian kinerja Tahun 2018 dengan capaian kinerja tahun 2017. Oleh karena itu untuk melihat peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018, maka dilakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2018 dengan capaian kinerja tahun 2017, seperti ditunjukkan pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 Dengan Tahun 2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2017	Capaian 2018
1	2	3	4	6
1	Terwujudnya transparansi pelayanan administrasi perkantoran dalam dalam lingkup badan kesatuan bangsa dan politik	1 Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100	100
2	Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas kedinasan	2 Cakupan unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana apartur	100	100
3	Meningkatnya kesadaran terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan	3 Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100	100
4	Terwujudnya rasa tenang dan aman serta nyaman di lingkungan masyarakat	4 Persentase kelompok masyarakat dan tokoh masyarakat yang berpartisipasi dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan	95,28	100
5	Terwujudnya rasa toleransi antar suku, agama, ras dan antar golongan	5 Persentase masyarakat kaltara yang berwawasan kebangsaan	98,78	100
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berpolitik yang sehat dan demokratis	6 Persentase partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik	98,99	96,34



Indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2017 dan Tahun 2018 merupakan indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Tahun 2016-2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalimantan Utara. Pada Tabel 3.4 terlihat bahwa dari 6 (enam) indikator kinerja pada tahun 2018 telah menunjukkan pencapaian yang maksimal. Untuk indikator kinerja yang diukur pada tahun 2017 dan 2018 terlihat bahwa pencapaian Tahun 2018 lebih baik dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017. Hal ini terlihat pada beberapa indikator sasaran kinerja Tahun 2018 mencapai 100%. Namun secara keseluruhan capaian indikator kinerja pada Tahun 2018 telah memenuhi target yang ditetapkan. Di samping itu, apabila dilakukan perbandingan pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2018 secara umum mampu meningkatkan capaian kinerja dari pada tahun 2017, yang tergolong sangat baik.

3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2018 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar **Rp. 10.143.249.088,- (Sepuluh Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Delapa Rupiah)** dengan rincian belanja tidak langsung sebesar **Rp. 4.461.742.164,- (Empat Milyar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Empat Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah)** dan belanja langsung sebesar **Rp. 5.501.506.924,- (Lima Milyar Lima Ratus Satu Juta Lima Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)** sedangkan realisasinya adalah **Rp 9.083.459.687,- (Sembilan Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 89,55 %** dengan rincian belanja tidak langsung sebesar **Rp 4.087.225.749,- (Empat Milyar Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 88,05 %**, dan belanja langsung sebesar **Rp 4.996.233.938,- (Empat Milyar**



Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Tiga Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 90,82 % jika diuraikan dalam tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

**Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2018**

NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN (%)
I	Belanja Tidak Langsung	4.641.742.164	4.641.742.164	4.087.225.749	88,05
	Belanja Pegawai	4.641.742.164	4.641.742.164	4.087.225.749	88,05
II	Belanja Langsung	5.511.506.924	5.501.506.924	4.996.233.938	90,82
	- Belanja Pegawai	1.679.959.000	1.201.896.000	1.141.171.925	94,95
	- Belanja Barang dan Jasa	3.764.056.924	4.252.110.924	3.812.660.926	89,67
	- Belanja Modal	47.500.000	47.500.000	42.401.100	89,27
	Jumlah	10.153.249.088	10.143.249.088	9.083.459.687	89,55



Tabel 3.6

**REALISASI ANGGARAN BADAN KESBANGPOL PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2016 - 2018**

NO	JENIS BELANJA	2016			2017			2018		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN (%)
I.	Belanja Tidak Langsung	5.233.341.522	2.986.952.262	57,08%	4.079.871.826	3.231.234.600	79,20	4.641.742.088	4.087.225.749	85,55
	Belanja Pegawai	5.233.341.522	2.986.952.262	57,08%	4.079.871.826	3.231.234.600	79,20	4.641.742.088	4.087.225.749	85,55
II.	Belanja Langsung	13.020.541.000	9.179.081.420	70,50%	7.524.692.000	6.795.403.150	90,31	5.501.506.924	4.996.233.938	90,82
	- Belanja Pegawai	4.250.480.000	3.495.580.000	82,24%	1.987.400.000	1.929.200.000	97,07	1.201.896.000	1.141.171.925	94,95
	- Belanja Barang dan Jasa	8.650.061.000	5.581.861.420	64,53%	5.497.292.000	4.828.220.150	87,83	4.252.110.924	3.812.660.926	89,67
	- Belanja Modal	105.000.000	101.640.000	84,70%	40.000.000	37.983.000	94,96	47.500.000	42.401.100	89,27
	Jumlah	18.253.882.522	12.166.033.682	66,65%	11.604.563.826	10.026.637.750	86,40%	11.604.563.826	9.083.459.687	89,55%



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2018. maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor : 08 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

4.1. Permasalahan

Kendala yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 dalam mengelola program dan kegiatan yaitu :

- 1) Adanya kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan 2018 sehingga ada kegiatan yang baru bisa dilaksanakan setelah APBD Perubahan disahkan. Namun kendala tersebut dapat diatasi dengan capaian program/kegiatan yang telah selesai dengan rata-rata kegiatan fisik untuk belanja langsung telah terlaksana 99,38% walaupun dari segi keuangannya hingga tanggal 31 Desember 2018 mencapai sebesar 90,82%.
- 2) Jumlah sumber daya manusia yang masih terbatas dan kurang memadai.
- 3) Pada kegiatan peningkatan kemitraan pemerintah, orpol, ormas dan kelembagaan lainnya bahwa pengadaan website belum terlaksana.
- 4) Pada kegiatan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, pilpres dan pilkada, bahwa adanya rekening untuk uang saku tidak dibayarkan.



4.2. Solusi

- 1) Diharapkan semua kegiatan yang telah disusun dapat terlaksana dengan tepat waktu sehingga tidak ada lagi kegiatan yang harus diselesaikan di akhir tahun anggaran. Perencanaan harus dilakukan dengan matang dan terencana sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk kedepannya.
- 2) Mengajukan usulan untuk penambahan pegawai yang kompeten pada tahun 2018 agar dapat memaksimalkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara pada tahun yang akan datang.
- 3) Dalam menyusun rencana kegiatan khususnya pada kegiatan peningkatan kemitraan pemerintah, orpol, ormas dan kelembagaan lainnya untuk lebih memperhatikan prioritas kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik dan dapat mencapai target.
- 4) Dalam menyusun rencana kegiatan khususnya pada kegiatan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, pilpres dan pilkada, untuk lebih diperhatikan dalam proses penganggarannya apakah perlu atau tidak untuk diberikan uang saku, sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya tidak mengalami kendala.

4.3. Kesimpulan

Pada Tahun Anggaran 2018 walaupun program, kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan terbatas, namun hal ini tidak menghalangi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara untuk bekerja semaksimal mungkin. Adapun seluruh kegiatan yang diamanahkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara pada tahun anggaran 2018 telah terlaksana semua melalui APBD tahun 2018 dengan capaian fisik mencapai **99,38%** dan keuangan mencapai **90,82%**.



Maka berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kegiatan maka pencapaian Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 adalah **99,38 %** yang berdasarkan skala ordinal maka capaian tersebut dapat dikategorikan “**AA**” .

Dengan segala keterbatasan yang ada pada Tahun 2018, namun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara telah berusaha maksimal agar dapat mewujudkan tujuan dan sasaran Kepala Daerah. Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi seperti SDM yang terbatas, molornya pengesahan APBD Perubahan 2018 pelan-pelan akan diperbaiki pada tahun yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Good Governance dan Clean Government yang melibatkan pihak-pihak terkait (Stake holder), sehingga kedepan akan tercapai sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Akhirnya berkat kerja keras serta ketekunan Tim Penyusun dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan, maka Laporan Kinerja ini dapat di susun sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditetapkan.



TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2018

PENANGGUNG JAWAB	:	Drs. BASIRAN, M.Si
KETUA	:	TAPIP PURNOMO, SH
SEKRETARIS	:	KASIYONO
ANGGOTA	:	1. DANI SULUH PERMADI, S.STP 2. AYOP CAHYONO, SE 3. SADRIANSYAH, S.IP 4. JAMALUDDIN, SE., M.Pd 5. ZAINUDDIN, S.Pd 6. ROHANI
SEKRETARIAT	:	1. EDWIN FITRIO, S.Kom. 2. SUPRI HARTINI 3. ABIGAIL TULAK, S.E, MAP 4. SARIFUDIN,S.IP, MAP. 5. YUDHI ISNANDAR, S. Sos. 6. RANOESTY LILING, M.H. 7. FAJAR, S. Sos.

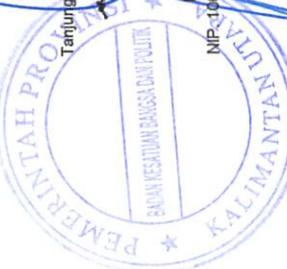


LAMPIRAN:

1. Tabel Rencana Kerja Tahun 2018 (Form RKT)
2. Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (Form PK)
3. Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2018 (Form PKK)

**RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya transparansi pelayanan adm perkantoran dalam lingkup badan kesatuan bangsa dan politik	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	%	100
2	Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas kedinasan	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	85
3	Meningkatnya kesadaran aparatur terhadap keaitan peraturan perundang-undangan	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	70
4	Terwujudnya rasa tenang dan aman serta nyaman dilingkungan masyarakat	Persentase kelompok masyarakat dan tokoh masyarakat yang berpartisipasi dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	88
5	Terwujudnya rasa toleransi antar suku, umat beragama, ras dan golongan	Persentase masyarakat kalhara yang berwawasan kebangsaan	%	80
6	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bermegara melalui politik.	Persentase partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik	%	76



 Tanjung Selor, 17 Januari 2018
 Kepala Badan,
 DRS/BASIRAN
 NIP.10691228 199101 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan.	Persentase angka potensi konflik sosial yang berbau suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).	14%
2	Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui politik.	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah	76%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pelayanan administrasi perkantoran	2,251,194,174	APBD Prov.
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	215,000,000	APBD Prov.
3	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	378,277,500	APBD Prov.
4	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	871,231,250	APBD Prov.
5	Pengembangan wawasan kebangsaan	858,044,000	APBD Prov.
6	Pendidikan politik masyarakat	927,760,000	APBD Prov.
	Jumlah	5,501,506,924	

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Form PKK

Program	Kegiatan					Pencapaian %	Ket.
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Input : Dana SDM Output : Jumlah surat menyurat yang dikirim Outcome : Tersedianya jasa surat menyurat kantor	Rp Orang Surat %	5,000,000 32 600 100	4,373,000 32 600 100	87.46 100 100 100	APBD PROV. KALTARA
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Dana SDM Output : Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Outcome : Terpenuhinya kebutuhan akan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp Orang Bulan %	63,000,000 32 12 100	43,798,577 32 12 100	69.52 100 100 100	APBD PROV. KALTARA
	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Input: Dana SDM Output: Jumlah tenaga jasa pengelola administrasi keuangan kantor Outcome: Tersedianya tenaga jasa pengelola administrasi keuangan kantor	Rp Orang Bulan %	917,100,000 32 12 100	858,344,109 32 12 100	93.38 100 100 100	APBD PROV. KALTARA
	4 Penyediaan jasa kebersihan	Input: Dana SDM Output: Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Outcome: Tersedianya petugas jasa dan bahan kebersihan kantor	Rp Orang Bulan %	54,200,000 32 12 100	48,178,727 32 12 100	88.89 100 100 100	APBD PROV. KALTARA
	5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Input: Dana SDM Output: Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki Outcome: Peralatan dan perlengkapan kerja yang layak pakai	Rp Orang Unit %	12,000,000 32 25 100	7,880,400 32 25 100	64.09 100 100 100	APBD PROV. KALTARA

1	2	3	4	5	6	7	8
	6 Penyediaan alat tulis kantor	Input: Dana SDM Output: Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan Outcome: Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor yang disediakan	Rp Orang Bulan %	60,074,174 32 12 100	52,690,440 32 12 100	87.71 100 100	APBD PROV. KALTARA
	7 Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Input: Dana SDM Output: Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Outcome: Tepenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Rp Orang Bulan %	57,500,000 32 12 100	56,849,540 32 12 100	98.87 100 100	APBD PROV. KALTARA
	8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung/kantor	Input: Dana SDM Output: Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Outcome: Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Rp Orang Bulan %	6,000,000 32 12 100	5,896,000 32 12 100	98.27 100 100	APBD PROV. KALTARA
	9 Penyediaan peralatan perlengkapan kantor	Input: Dana SDM Output: Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Outcome: Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Rp Orang Unit %	53,500,000 32 5 100	43,871,100 32 5 100	82.00 100 100	APBD PROV. KALTARA

1	2	3	4	5	6	7	8	
	10	Penyediaan peralatan rumah tangga	Input: Dana SDM Output: Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Outcome: Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor	Rp Orang Jenis %	3,120,000 32 2 100	889,000 32 2 100	31.70 100 100 100	APBD PROV. KALTARA
	10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input: Dana SDM Output: Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Outcome: Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp Orang Esemplar Unit Kerja	25,000,000 32 2,160 100	23,561,000 32 2,160 100	94.24 100 100 100	APBD PROV. KALTARA
	11	Penyediaan makan minum kantor	Dana SDM Output: Jumlah makan/minum yang disediakan Outcome: Tersedianya makan/minum yang disediakan	Rp Orang Porsel %	85,200,000 32 4,000 100	85,000,000 32 4,000 100	99.77 100 100 100	APBD PROV. KALTARA
	12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Input: Dana SDM Output: Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Outcome: Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp Orang Kali %	450,000,000 32 60 100	438,080,514 32 60 100	97.35 100 100 100	APBD PROV. KALTARA

1	2	3	4	5	6	7	8		
	13	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah	Dana SDM Output: Jumlah rapat rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah Outcome: Terlaksananya rapat rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah	Rp Orang Kali %	459,500,000 32 143 100	443,761,603 32 143 100	96.57 100 100 100	APBD PROV. KALTARA	
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	Penyewaan gedung/gudang/kantor	Input: Dana SDM Output: Jumlah rumah/gedung/gudang/ parkir kantor dinas yang disewa Outcome: Tersedia rumah/gedung/gudang/ parkir kantor dinas yang disewa	Rp Orang Unit %	100,000,000 32 1 100	99,000,000 32 1 100	99.00 100 100 100	APBD PROV. KALTARA
		2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Input: Dana SDM Output: Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala Outcome: Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Rp Orang Unit %	115,000,000 32 33 100	79,768,598 32 33 100	69.36 100 100 100	APBD PROV. KALTARA
3	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	Pendidikan pelatihan formal	Input : Dana SDM Output : Jumlah peserta diklat formal Outcome : Target aparatur yang mengikuti diklat	Rp Orang Orang %	187,377,500 32 27 100	181,340,070 32 27 100	96.78 100 100 100	APBD PROV. KALTARA
		2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Input : Dana SDM Output : Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan Outcome : Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Rp Orang Kegiatan %	190,900,000 32 1 100	141,025,187 32 1 100	73.87 100 100 100	APBD PROV. KALTARA

1	2	3	4	5	6	7	8		
4	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1	Penyuluhan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Input: Dana SDM Output: Jumlah kegiatan penyuluhan tentang keamanan dan kenyamanan lingkungan Outcome: Terlaksananya kegiatan penyuluhan tentang keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp Orang Kegiatan %	194,000,000 32 2 100	177,420,717 32 2 100	91.45 100 100 100	APBD PROV. KALTARA
		2	Pengendalian konflik sosial di masyarakat	Input: Dana SDM Output: Jumlah rapat pengendalian penanganan konflik sosial Outcome: Terlaksananya rapat pengendalian penanganan konflik sosial	Rp Orang Kegiatan %	217,100,000 32 3 100	200,099,331 32 3 100	92.17 100 100 100	APBD PROV. KALTARA
		3	Peningkatan kewaspadaan dini pemerintah dan masyarakat	Input: Dana SDM Output: Jumlah kegiatan deteksi dini dan pencegahan dini terhadap segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di lingkungan masyarakat Outcome: Terlaksananya kegiatan deteksi dini dan pencegahan dini terhadap segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di lingkungan masyarakat	Rp Orang Kegiatan %	220,100,000 32 2 100	174,898,077 32 2 100	79.46 100 100 100	APBD PROV. KALTARA
		4	Peningkatan kerjasama pengawasan orang asing dan lembaga asing	Input: Dana SDM Output: Jumlah rapat dengan instansi yang terkait dalam pengawasan orang asing dan lembaga asing Outcome: Terlaksananya rapat dengan instansi yang terkait dalam pengawasan orang asing dan lembaga asing	Rp Orang Kegiatan %	240,031,000 32 3 100	239,670,942 32 3 100	99.85 100 88,67 100	APBD PROV. KALTARA

1	2	3	4	5	6	7	8		
5	Pengembangan wawasan kebangsaan	1	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Input: Dana SDM Output: Jumlah rapat pengurus dan anggota FKUB dengan tokoh agama dan masyarakat Outcome: Terlaksananya rapat pengurus dan anggota FKUB dengan tokoh agama dan masyarakat	Rp Orang Kegiatan %	149,084,000 32 1 80	149,032,283 32 1 1	97.95 100 100 1	APBD PROV. KALTARA
		2	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di kalangan masyarakat	Dana SDM Output: Jumlah kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial Outcome: Terlaksananya kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial	Rp Orang Kegiatan %	180,355,000 32 1 100	158,504,500 32 1 100	98.85 100 95.00 100	APBD PROV. KALTARA
		3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Dana SDM Output: Jumlah kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya Outcome: Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Rp Orang Kegiatan %	181,525,000 32 1 100	163,175,900 32 1 100	89.89 100 100 100	APBD PROV. KALTARA

1	2	3	4	5	6	7	8		
	4	Pencapaian Halaqoh dan berbagai Forum Keagamaan lainnya dalam upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Dana SDM Output: Jumlah rapat forum pembauran kebangsaan (FPK) Outcome: Terlaksananya rapat forum pembauran kebangsaan (FPK)	Rp Orang Kali %	181,980,000 32 1 100	148,396,573 32 1 100	81.55 100 100 100	APBD PROV. KALTARA	
	5	Seminar, Talk show, diskusi Peningkatan wawasan kebangsaan	Dana SDM Output: Jumlah seminar dan diskusi wawasan kebangsaan Outcome: Terlaksananya seminar, Talk show, diskusi Peningkatan wawasan kebangsaan	Rp Orang Kali %	185,100,000 32 2 100	173,696,631 32 2 100	93.84 100 100 100	APBD PROV. KALTARA	
6	Pendidikan politik masyarakat	1	Penyuluhan Politik kepada Masyarakat	Dana Output: Jumlah penyuluhan tentang pendidikan politik Outcome: Terlaksananya penyuluhan tentang pendidikan politik	Rp Orang Kegiatan %	108,350,000 32 7 100	105,059,596 32 7 100	96.96 100 100 100	APBD PROV. KALTARA
		2	Peningkatan Kapasitas Partai Politik	Input: Dana SDM Output: Jumlah verifikasi dan monitoring bantuan keuangan partai politik Outcome: Terlaksananya verifikasi dan monitoring bantuan keuangan partai politik	Rp Orang Kali %	250,100,000 32 12 100	214,833,783 32 12 100	85.90 100 100.00 100	APBD PROV. KALTARA

1	2	3	4	5	6	7	8
	3 Peningkatan Kermitraan Pemerintah, Orpol, Ormas dan Kelembagaan	Dana SDM Output: Jumlah pelayanan atas pengajuan SKT, Tanda lapor ormas dan verifikasi bantuan hibah ormas Outcome: Terlaksananya pelayanan atas pengajuan SKT, Tanda lapor ormas dan verifikasi bantuan hibah ormas	Rp Orang Kali %	242,200,000 32 6 100	202,412,962 32 6 93	83.57 100 100 93	APBD PROV. KALTARA
	4 Sosialisasi Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kalimantan Utara	Dana SDM Output: Jumlah sosialisasi tentang nilai indeks demokrasi Indonesia Outcome: Terlaksananya sosialisasi tentang nilai indeks demokrasi Indonesia	Rp Orang Kegiatan %	122,950,000 32 1 100	111,852,280 32 1 100	91.06 100 100 100	APBD PROV. KALTARA
	5 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, Pilpres, dan Pilkada	Dana SDM Output: Jumlah sosialisasi undang-undang pemilihan umum Outcome: Terlaksananya sosialisasi undang-undang pemilihan umum	Rp Orang Kegiatan %	204,180,000 32 1 100	188,080,600 32 1 95	82.33 100 100 95	APBD PROV. KALTARA